KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu merupakan penjabaran dari Surat Edaran Bupati Kabupaten Mahakam Ulu No. 050/50212242.1.692/Bapelitbangda/III tentang Tahapan dan jadwal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026, yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahu 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah. Disamping itu, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tetang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) disusun sebagai Implementasi dari tahapan perencanaan tahunan . Penyusunan Rencana Kerja Merupakan Faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Pembagunan Daerah yang berkesinambungan dan dapatdi pertanggungjawabkan .

Diharapkan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat memberikan arah dan perpedoman untuk rencana.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan semakin meningkat.

Ujoh Bilang, Februari 2025

Kepala Badan,

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[redacted]ERTUS IBRAHIM, SE,M.SI
Pembina Tk.1 (IV/B)
NIP. 19691231 200212 1 031

`

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	ii-1
DAFTAR ISI		.....	ii-2
DAFTAR TABEL		.....	iii
DAFTAR GAMBAR		.....	iv
BAB		**PENDAHULUAN**.....	1.1
	1.1	Latar Belakang	II-5
	1.2	Landasan Hukum	II-6
	1.3	Maksud dan Tujuan	II-7
		1.3.1 Maksud	
		1.3.2 Tujuan	
	1.4	Sistematika Penulisan	II-7
BAB II		**HASIL EVALUASI RENCANA RENJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	II-10
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu...	II-11
		2.2 Analis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.....	II-23
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.....	II-27
		2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-28
		2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-29
BAB III		**TUJUAN DAN SASARA PERANGKAT DAERAH**	IV-2
		3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	IV-8
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu	IV-9
		3.3 Program dan Kegiatan.....	IV-11
BAB IV		**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**…	IV-21
BAB V		**PENUTUP**	IV-63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu sampai dengan Tahun 2024
Tabel 2.4 Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahaka Ulu Tahun 2026
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupaten Mahakam Ulu
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu merupakan penjabaran dari Surat Edaran Bupati Kabupaten Mahakam Ulu No. 050/50212242.1.692/Bapelitbangda/III tentang Tahapan dan jadwal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026. yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Surat Edaran Bupati Mahakam Ulu Nomor 050/5021224.692/Bapelitbangda.III Tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 2Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026. yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu. Selanjutnya, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam
Ulu Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Sfisiensi Belanja Ddalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 2Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026;
9. Surat Edaran Bupati Kabupaten Mahakam Ulu No.050/5021224.1.692/Bapelitbangda.III tentang tahapan Jadwal Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026 ;
10. Intruksi Bupati Kabupaten Mahakam ulu Nomor 01Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.

2 Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu secara berkesinambungan.

2.2 Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 bertujuan:

2.2.1 Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026;

2.2.2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu secara sistematis dan terorganisir;

2.2.3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

2.2.4 Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

3 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan sebanyak 6 Program,11 kegiatan, dan 29 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp.47 .988.100.272.000 (Empat Puluh Tujuh Myliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 45.384.569.340,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 94,57 persen.

Pelaksanaan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dengan beberapa indikator, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Program ini dilaksanakan oleh bidang Sekretariat , yaitu Bidang Perencanaan Program Keuangan dan Umum dan Kepegawaian Target program pada tahun 2024 adalah Nilai Sakip OPD yaitu CC, realisasi program CC, dan capaian kinerja program CC. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.219.945.199 dengan realisasi sebesar Rp 6,921.528.676,- atau sebesar 84.20 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Pengelolaan Administrasi keuangan yang Akuntabel. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih Terbatas.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.559.723.236 dengan realisasi sebesar Rp 3.395.699.194,- atau terserap 84,20 persen, yang terdiri dari 2 Sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.276.953.196 dengan realisasi sebesar Rp 3.125.430.694 atau terserap 73.08 persen.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 282.770.040 dengan realisasi sebesar Rp 270.268.500,- atau terserap 95.58 persen

2. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 572.067.463,- dengan realisasi sebesar Rp 552.510.731,- atau terserap 96.27 persen, yang terdiri dari 4 Sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 505.763.300 dengan realisasi sebesar Rp 486.887.731 atau terserap 96.27 persen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan triwulan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 45.580.363 dengan realisasi sebesar Rp 45.086.000 atau terserap 98.92 persen.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.616.700 dengan realisasi sebesar Rp 10.492.000 atau terserap 98.83 persen.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.107.700 dengan realisasi sebesar Rp 10.045.000 atau terserap 99.39 persen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.265.018.100,- dengan realisasi sebesar Rp 1.245.784.190,- atau terserap 98.48 persen, yang terdiri dari 5 Sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.196.300 dengan realisasi sebesar Rp 25.051.000 atau terserap 99.42 persen.

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.790.400 dengan realisasi sebesar Rp 9.236.000 atau terserap 94.34 persen

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 152.778.800 dengan realisasi sebesar Rp 134.638.400 atau terserap 88.13 persen.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 76.224.600 dengan realisasi sebesar Rp 75.900.000 atau terserap 99.57 persen.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.001.028.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.958.790 atau terserap 99.99 persen.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.602.867.600,- dengan realisasi sebesar Rp 1.511.459.100,- atau terserap 94,30 persen, yang terdiri dari 4 Sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.500.000 atau terserap 70 persen

b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 52.680.000 dengan realisasi sebesar Rp 51.790.000 atau terserap 98.31 persen

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.535.187.600 dengan realisasi sebesar Rp 1.449.169.100 atau terserap 94.40 persen

5. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 220.268.800,- dengan realisasi sebesar Rp 216.075.461,- atau terserap 98.10 persen, yang terdiri dari 2 Sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Dinas Kendaraan Operasional atau Lapangan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 70.228.800,- dengan realisasi sebesar Rp 66.075.461,- atau terserap 94.08 persen.

b. Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 150.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp 150.000.000,- atau terserap 99.97 persen

A. Program Penguat Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan dengan Indikator Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan Kebangsaan , Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Agama Target program pada tahun 2024 adalah 94%, realisasi program 83.33 % Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.836.757.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.751.029.218,- atau sebesar 97.77 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Tersedianya anggaran yang mencukupi sesuai yang telah di Ajukan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Masih Kurangnya Mengalokasikan kegiatan untuk Sosialisasi sesuai Tugas dan Fungsi Sub Bagian Terkait.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.836.757.000 dengan realisasi sebesar 3.751.029.218,- atau terserap 97.77 persen, yang terdiri dari 2 Sub kegiatan, yaitu:

a. Perumusan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan, bela Negara Karakter Bangsa , pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

   Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.815.240.100 dengan Realisasi Sebesar Rp.802.427.318 atau terserap 98.43 persen.

b. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan, bela Negara Karakter Bangsa , pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.3.021.516.900 dengan Realisasi Sebesar Rp.2.948.601.900,- atau terserap 97.58 persen.

B. Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politk dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dam Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dilaksanakan dengan indikator Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat, yaitu Bidang Politik Dalam Negeri Target program pada tahun 2024 adalah 90%, realisasi program 100% Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.357.828.973 dengan realisasi sebesar Rp 31.378.413.076.- atau sebesar 96.97 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Ketersediaan Anggaran yang cukup Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Terlambatnya Proses Administrasi Keuangan Untuk Bantuan Partai Politik.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah , Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta pemantauan situasi Politik**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 32.357.828.973 dengan realisasi sebesar Rp 31.378.413.076,- atau terserap 96.97 persen, yang terdiri dari 2 Sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah , Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta pemantauan situasi Politik
      Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.31,951.980.100 dengan Realisasi Sebesar Rp.31.281.474.962,- atau terserap 97.90 persen.
   b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah , Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta pemantauan situasi Politik
      Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.405.848.873 dengan Realisasi Sebesar Rp. 96.938.114 atau terserap 23,89% persen.

C. Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Pembinaan dan Pemngembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya ilaksanakan dengan indikator Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama , yaitu Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan dan Ketahanpada tahun 2024 adalah 94%, realisasi program 0 Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.632.462.800,- dengan realisasi sebesar Rp 2.410.826.915.- atau sebesar 91,58% . Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Tersedianya Anggaran Yang Cukup sesuai dengan Kebutuhan pelaksanaan program. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Program Tidak Terlaksana.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya.**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.632.462.800,- dengan realisasi sebesar Rp 2.410.826.915,- atau terserap 91.58 persen, yang terdiri dari 1 Sub kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FAsilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di daerah.

   Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 2.632.462.800,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 2.410.826.915,- atau terserap 91.58 persen.

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan dengan indikator Persentase Ormas/LSM yang terbina di Badan Kesbangpol, yaitu Bidang Organisasi Masyarakat program pada tahun 2024 adalah 90%, realisasi program 50% Anggaran untuk program ini sebesar Rp.182.839.700 dengan realisasi sebesar Rp 173.878.400. atau sebesar 95,09 % persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Tersedianya anggaran dari APBD maupun Anggaran Bantuan untuk pembinaan Ormas dari Kementrian. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Masih Kurangnya Pembinaan Terhadap ORMAS/LSM.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 182.839.700 dengan realisasi sebesar Rp 173.878.400 atau terserap 95.09 persen, yang terdiri dari 1 Sub kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftranan Ormas , Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, pengawasan dan Orang Asing di daerah

   Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 182.839.700 dengan Realisasi Sebesar Rp. 173.878.400 atau terserap 95.09 persen.

E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan dengan indikator Persentase Potensi Konflik Sosial yang di Tangani bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik program pada tahun 2024 adalah 89%, realisasi program 0 % Anggaran untuk program ini sebesar Rp.758.266.600 dengan realisasi sebesar Rp 748.893.055. atau sebesar 97 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Ketersediaan Anggaran Yang Mencukupi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Penggunaan Anggaran yang masih Belum mencerminkan pencapaian Terget yang sudah dilaksanakan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 758.266.600 dengan realisasi sebesar Rp 748.893.055 atau terserap 8.76 persen, yang terdiri dari 1 Sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen , Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan konflik Sosial di Daerah

Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 99.988.200 dengan Realisasi Sebesar Rp. 96.940.000 atau terserap 97 persen.

b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 658.278.400 dengan Realisasi Sebesar Rp. 651.953.055 atau terserap 99 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
URUSAN PEMERINTAH UMUM			47.988.100.272		45.383.569.340	94.57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	CC	8.219.945.199		6.921.528.676	84.20
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama satu Tahun	100%	4.559.723.236	100%	3.395.699.194	74
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	4.276.953.196		3.125.430.694	73
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	282.770.040		270.266.500	95.58
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Penyediaan Perencanaan , Pengganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	572.067.463	100%	552.510.731	96.58
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah	6 Dokumen	505.763.300	6 Dokumen	486.867.731	96.27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Bulanan/ Triwulan/semester / SKPD	1 Laporan	45.580.363	1 Lapporan	45.086.000	98.92

Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.616.700	3 Laporan	10.492.000	98.83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	10.107.100	2 Laporan	10.045.000	99.39
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	1.265.018.100	92.53%	1.245.784.190	98.48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bagunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bagunan kantor yang disediakan	2 Paket	25.196.300	2 Paket	25.051.000	99.42
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	9.790.400	1 paket	9.236.000	94.34
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik kantor yang di sediakan	2 paket	152.778.800	2 Paket	134.638.400	88.13
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 paket	76.224.600	1 Paket	75.900.000	99.57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.001.028.000	55 Laporan	1.000.958.790	99.99
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	1.602.867.600	100%	1.511.459.100	94.30
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	10.500.000	70.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	7 Laporan	52.680.000	7 Laporan	51.790.000	98.31

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.535.187.600	12 Laporan	1.449.169.100	94.40
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	100%	220.268.800	37,5%	216.075.461	98.09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Dinas kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayarkan Pajak dan perijinannya	7 Unit	70.228.800	2 Unit	66.075.461	94.08
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan lainnya	Jumlah Gedung, Kantor dan Bagunan yang di rehap atau pemeliharaan	1 Unit	150.040.000	1 Unit	150.000.000	99.97
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	94 %	3.836.757.000	83,33%	3.751.029.218	97.77
Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara karakter Bangsa , pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	100%	3.836.757.000	35.43%	3.751.029.218	97.77
Perumusan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara karakter Bangsa , pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara karakter Bangsa , pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	40 Laporan	815.240.100	9 Laporan	802.427.318	98.43
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara karakter Bangsa , pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara karakter Bangsa , pembauran Kebangsaan	80 Dokumen	3.021.516.900	45 Dokumen	2.948.601.900	97.59

	Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan					
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	90%	32.357.828.973	100%	31.378.413.076	96.97
Kegiatan Perumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik**	100%	32.357.828.973	35.43%	31.378.413.076	96.97
Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat yang menyalurkan hak suara pada Pemilu dan Pilkasa	200 Orang	31.951.980.100	248 Orang	31.281.474.962	97.90
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Dekk=mokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah.	500 Orang	405.858.873	0	96.938.114	23.89
PROGRAM PERUMUSAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang dibina	90%	182.839.700	50%	173.878.400	95.10

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	182.839.700	90%	173.878.400	95.10
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas,evaluasi dan Medisi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Laporan	182.839.700	9 Laporan	173.878.400	95.10
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Ke masyarakatan dan Ekonomi	94 %	2.632.462.800	35 %	2.410.826.915	91.58
Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	2.632.462.800	35%	2.410.826.915	91.58
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengayatan Kepercayaan di Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi social Budaya dan Agama	200 Orang	2.632.462.800	70 Orang	2.410.826.915	91.58
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang di Tangani	89%	758.266.600	35%	748.893.005	97
Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanganan konflik sosial	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan	100%	758.266.600	5.68%	748.893.005	97

	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75 Laporan	99.988.200	1 Laporan	96.940.000	97
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	658.278.400	4 Dokumen	651.953.055	99

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat SAKIP OPD	CC	CC
2	Meningkatkan Pemahakam Idiologi dan wawasan kebangsaan pada masyakat Kabupaten Mahakam ulu	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan wawasan Kebangsaan	94%	83,33%
3	Aktifnya ORMAS/LSM dalam membantu pemerintah dalam Pembangunan	Persentase Ormas/LSM yang dibina	90%	50%
4	Meningkatkan Pemahakam Politik Pada Masyakat Kabupaten Mahakam Ulu	Tingkat Partisipasi politik Masyarakat.	90%	100%
5	Meningkatnya Pembinaan dan Perkembangan Ketahan Ekonomi,Sosial, Agama dan Budaya.	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi	94%	35%
6	Menurunya Konflik Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu	Persentase potensi konflik sosial yang Diselesaikan	89%	35%

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 6 (enam) indikator kinerja program dan 10 (sepuluh) kegiatan, 21 (dua puluh satua) sub kegiatan dengan 21 (dua Puluh satua) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 6 (enam) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator yang melampaui target,Predikat SAKIP indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 21 (dua Puluh satua) indikator kinerja sub kegiatan, 7 (tujuh) indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan,6 (enam) program dengan 6 (enam) indikator kinerja program dan 10 (sepuluh) kegiatan, 21 (dua Puluh satu) sub kegiatan dengan 21 (dua Puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 6 (enam) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 5 (Lima) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 5 (lima) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.
3. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

   Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu adalah yang meliputi:
   1. Perumusan Kebiajak Teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   2. Pelaksanaan kebiajakan di bidang pembinaan idiologi Pancasila dan wawasan kebangsanaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemilihan ketahanan ekonomi, social dan budaya,, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspdaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, dan intra suku, umat ber agama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspdanaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   4. Pelaksanaan Evalusai dan pelaporan di bidang pembinaan idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, dan intra suku, umat ber agama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspdanaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   5. Pelaksanaan Fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah dan;
   6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik daerah.

Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) ;
2. Persetnase elemen Masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan;
3. Persentase elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
4. Persetase Ormas/LSM yang dibina dan aktif
5. Persentase elemen masyakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahan ekonomi, social, budaya dan agama;
6. Persentase potensi konflik social yang ditangani.

Berdasarkan RPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilawah daerah serta tugas pembantuan yang diberika kepala daerah. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Sasaran:						
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prediak SAKIP OPD	CC	Cc	CC	B	CC
Meningkatkan Pemahaman Idiologi dan wawasan kebangsanaan pada Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu	Persentase Elemen Masyakat yang mendapatkan Pembinaan wawasan	93%	94%	95%	97%	83.33%

	kebangsaan					
Aktifnya Ormas/LSM dalam membantu pemerintah dalam pembangunan	Persentase Ormas/LSM yang dibina dan aktif	86%	90%	90%	90%	50%
Meningkatkan Pemahaman Politik pada masyakat kabupaten Mahakam ulu	Persentase elem masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan pengembangan etika serat budaya politik	87%	90%	92%	92%	100%
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,social, Budaya dan Agama	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan dibidang ekonomi,sosial,budaya dan agama	93%	94%	95%	96%	35%
Menurunya konflik social pada Masyarakat kabupaten Mahakam ulu	Persentase Potensi Konflik social yang ditangani	87%	89%	90%	92%	35%

4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Birokrasi pemerintah yang bersih professional berorientasi pelayanan publik;
2. Belum optimalnya nasionalisme dan stabilitas daerah;
3. Belum terciptanya Masyarakat Mahakam ulu yang harmonis dan demokratis.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Pelayanan yang kurang professional
2. Masih rendahnya cakupan pembinaan wawasan kebangsaan di Masyarakat khususnya generasi muda;
3. Melemahnya ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama di daerah;
4. Masih rendahnya pencegahan stunting di daerah;
5. Minimnya Pendidikan Politik pada masyakat;
6. Rendahnya jumlah ormas yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan;
7. Rawan terjadinya konflik social pada masyakat;
8. Adanya isu kedatangan warga asing;
9. Kurangnya Sarana Pendukung Insfrstruktur Politic dengan kondisi Geografis yang sulit;
10. Adanya indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada tahun-tahun berlangsungnya pengembangan system politik akibat tuntutan reformasi;
11. Adanya sikap saling krangnya menghargai terutama dalam perspektif politik terkait persoalan budaya politik;
12. Belum tersedianya data Ormas dan tidak lengkapnya berkas Pendaftaran Ormas ;
13. Konflik di tahun Politik .

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Koordinasi;
2. Konsultasi;
3. Konsolidasi;
4. Revitalisasi;
5. Inventarisasi;
6. Sosialiasasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu, dapat diformulasikan isu-isu strategis

yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut:

1. Belum dipahami arti pentingya wawasan kebangsaan, Penetrasi Idiologi dan Konflik Agama
2. Minimya sosialisasi serta pemahaman Masyarakat tentang pendidikan Politik
3. Minimnya Pembinaan dengan LSM,Ormas dan Nirlaba yang mempunyai kemungkinan efek negatif dan ancaman instabilitas;
4. Belum terwujudnya sinergisitas dalam terciptanya stabilitas politik dan meningkatkan saranan pendukung Insfrastruktur Politik untuk menjadi solusi kondisi geografis yang sulit;
5. Rendahnya minat Ormas melaporakan/mendaftarkan Ormas yang didirikan;
6. Pada tahun Politik Ormas yang didirikan cendrung menjadi alat kepentingan Politik dalam mengumpulkan masa sehingga Ormas berjalanan tidak sesuai Visi dan Misi pendirian Ormas tersebut, memungkinkan Konflik antar Ormas, sehingga perlunya sosialisasi Monitoring Evalusasi dan Pembinaan Ormas dengan tujuan mencegah kemungkinan terjadinya Konflik antar Ormas di saat tahun Politik.

5. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 adalah **"*Mencapai Mahulu yang Sejahtera dan Berkeadilan*"** dengan prioritas daerah berupa :

1. Peningkatan Konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup;
3. Peningkatan sumber daya pertanian dan perkebunan sehingga dapat mendorong meningkatnya produksi hasil pertanian dan perkebunan
4. Peningkatan usaha ekonomi rakyat
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah

Penekanan untuk pelaksanaan Pembangunan pada masing – masing prioritas daerah Kabupaten Mahakam Ulu di tuangkan ke dalam sasaran daerah yaitu :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan
2. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih
3. Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna Listrik
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet
5. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni
6. Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara
7. Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
8. Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam
9. Meningkatnya investasi daerah

10. Berkurangnya angka kemiskinan
11. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
12. Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat
13. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
14. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
16. Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah
17. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu mendukung pencapaian sasaran ke 8 dan 15 yaitu:

1. Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						Rp.21.786.644.564,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√			Rp.21.786.644.564,-	Badan Kesbangpol
2	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						Rp.21.786.644.564,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√			Rp.21.786.644.564,-	Badan Kesbangpol
3	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Predikat SAKIP OPD	B		B	B	Rp.10.676.259.300,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	B	Rp.10.676.259.300,-	Badan Kesbangpol

4	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Program, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	100%	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol
5	8.01.01.2.01.0001	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp.447.574.400,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	6 Dokumen	Rp.447.574.400,-	Badan Kesbangpol
6	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih	2 Laporan	Rp.	Badan Kesbangpol

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
7	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	3 Laporan	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol
8	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	89%	89%	89%	Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	89%	Rp.	Badan Kesbangpol
9	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23 Orang	13 Orang	13 Orang	23 Orang	Rp. 7.072.967.648,-	Ujoh Bilang-	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan	23 Orang	Rp. 7.072.967.648,-	Badan Kesbangpol

		Tunjangan ASN	Tunjangan ASN						Mahakam Ulu				yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
10	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 366.360.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	12 Dokumen	Rp. 366.360.000,-	Badan Kesbangpol
11	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp.10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas	1 Laporan	Rp.10.000.000,-	Badan Kesbangpol

													pengelolaan keuangandaerah			
12	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	92,53%	92,53%	92,53%	Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	92,53 %	Rp.	Badan Kesbangpol
13	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp. 15.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	2 Paket	Rp. 15.000.000,-	Badan Kesbangpol
14	8.01.01.2.06.0003		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp. 5.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Paket	Rp. 5.000.000,-	Badan Kesbangpol

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
15	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp. 150.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	2 Paket	Rp. 150.000.000,-	Badan Kesbangpol
16	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	1 Paket	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol

17	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		6				Rp.10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah		Rp.10.000.000,-	Badan Kesbangpol
18	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	18 Laporan	Rp. 800.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	18 Laporan	Rp. 800.000.000,-	Badan Kesbangpol
19	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100 %				Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih		Rp.	Badan Kesbangpol

												3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
20	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		6 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	3 Unit		Badan Kesbangpol
21	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	100%		Badan Kesbangpol
22	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan	12 Laporan		Badan Kesbangpol

			Jasa Surat Menyurat										yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
23	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	5 Laporan		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	5 Laporan		Badan Kesbangpol
24	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 1.093.593.200,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas	12 Laporan	Rp. 1.093.593.200,-	Badan Kesbangpol

													pengelolaan keuangandaerah			
25	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	14,28%	14,28%	100%		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	100%		Badan Kesbangpol
26	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	2 Unit	2 Unit	7 Unit	90.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	7 Unit	90.000.000,-	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit			10 Unit	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	10 Unit	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol

													2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
27	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp.150.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	1 Unit	Rp.150.000.000,-	Badan Kesbangpol
28	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan wawasan Kebangsaan	97%	83.33%	83.33%	97%	Rp. 3.821.846.900,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pemahakam idiologi dan wawasan kebangsaan pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	97%	Rp. 3.821.846.900,-	Badan Kesbangpol
29	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan**	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi	100%	45%	45%	45%	Rp. 3.821.846.900,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		45%	Rp. 3.821.846.900,-	Badan Kesbangpol

		Karakter Kebangsaan	Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
30	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	55 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	10 Dokumen	Rp. 299.999.300,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		10 Dokumen	Rp. 299.999.300,-	Badan Kesbangpol
31	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	Rp. 499.999.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu	12 Laporan	Rp. 499.999.700,-	Badan Kesbangpol

32	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	45 Orang			45 Orang	Rp. 3.021.847.900,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pemahaman idiologi dan wawasan pada Masyarakat kabupaten Mahakam ulu	45 Orang	Rp. 3.021.847.900,-	Badan Kesbangpol
33	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	92%	100%	100%	97%	Rp. 1.223.408.864,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pemahaman politik pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	97%	Rp. 1.223.408.864,-	Badan Kesbangpol
34	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala**	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokerasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	100%	35.43%	35.43%	100%		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pemahaman politik pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	100%		Badan Kesbangpol

		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik													
35	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350 Orang	248	248	248	Rp. 360.712.500,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		248	Rp. 360.712.500,-	Badan Kesbangpol
37	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	500 Orang	0	0	250 Orang	0	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu	250 Orang	0	Badan Kesbangpol

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
38	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	0	0	4 Laporan	Rp. 592.696.364,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		4 Laporan	Rp. 592.696.364,-	Badan Kesbangpol
40	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASA**	Persentase Ormas/LSM yang terbina	90%			90 %	Rp. 281.047.800,-	Ujoh Bilang-	APBD	-	√	Meningkatkan keaktifan Ormas/LSM dalam mebantu	90 %	Rp. 281.047.800,-	Badan Kesbangpol

		N ORGANISASI KEMASYARAKATAN	di Badan Kesbangpol					Mahakam Ulu				pemerintah dalam pembangunan			
41	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	100%	50%	50%	100%	Rp. 281.047.800,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan keaktifan Ormas/LSM dalam mebantu pemerintah dalam pembangunan	100%	Rp. 281.047.800,-	Badan Kesbangpol
42	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	4Laporan	Rp. 281.047.800,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		4Laporan	Rp. 281.047.800,-	Badan Kesbangpol
43	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	96%	35%	37,23%	96%	Rp. 640.744.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,social,b	94%	Rp. 640.744.700,-	Badan Kesbangpol

		KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ekonomi, Sosial dan Budaya										udaya dan agama.			
44	8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi,Sosial dan BudayKegiatan a	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi,Sosial dan BudayKegiatan a	100%	35%	35%	100%	Rp. 640.744.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,social,budaya dan agama.	100%	Rp. 640.744.700,-	Badan Kesbangpol
45	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	70	35%	150 Orang	Rp. 640.744.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,social,budaya dan agama.	150 Orang	Rp. 640.744.700,-	

46	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	96%	35%	39,32%	96%	Rp. 5.143.337.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	89%	Rp. 5.143.337.000,-	Badan Kesbangpol
47	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	5.68%	5.68%	100%	Rp. 5.143.337.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	100%	Rp. 5.143.337.000,-	Badan Kesbangpol
48	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	75 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	Rp.3.895.563.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	12 Laporan	Rp.3.895.563.000,-	Badan Kesbangpol

		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
49	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9 Dokumen	Rp. 1.134.240.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	9 Dokumen	Rp. 1.134.240.000,-	Badan Kesbangpol

Sumber: …… (URL di SIPD) [SIPD posisi Rancangan Awal]

6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota, dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2025 adalah *"**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorongkKewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelaraasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan fungsi

1. Merumuskan Kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahana ekonomi, social dan budaya pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahana ekonomi, social dan budaya pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah ; dan
6. Pelaksanaan administrasi kesekretarisan badan kesatuan bangsa dan politik daerah.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025, yaitu "***Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPD, serta isu strategis di tahun 2025, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 adalah: *"**Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas sumber daya manusia;
2. Pemantapan kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang aman dan nyaman;
3. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi untuk pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang;

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
8. MeningkatnyakKapasitas tata kelola pemerintahan;
9. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
10. Meningkatnya keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

N0	**Tujuan Dan Sasaran**	**Tujuan Dan Sasaran**
	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	**Indek Gini**
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak
	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna Listrik	Presentase KK yang dialiri listrik
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi
	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	**Indek Kualitas Lingkungan Hidup**
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air
		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air
		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan
	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)
	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)*
	Meningkatkan Kesejatraan Masyarakat	**PDRB Per Kapita meningkat dari 85,38 Menjadi 120,48 Di Akhir Periode**
	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indek Pembagunan Manusia
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah
		Harapan Lama Sekolah
	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah
	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang bersih Profesional dan berorientasi pelayanan publik	**Indeks Reformasi Birokrasi**
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju
		Jumlah Desa Tertinggal
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026, yaitu “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang harmonis dan demokratis”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu yaitu;

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD;
2. Terjaganya Idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan di kabupaten Mahakam Ulu dengan indicator sasaran Persentase Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Menurunnya Potensi Konflik di masyarakat di kabupaten Mahakam Ulu, dengan indicator sasaran ersentase Potensi Konflik Sosial yang ditangani;
4. Meningkatnya Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan indicator sasaran Persentase elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
5. Meningkatnya Jumlah Ormas yang terbina di kabupaten Mahakam Ulu, dengan indicator sasaran, Persentase Ormas/ LSM yang terbina dan aktif;
6. Menigkatnya ketahanan Ekonomi,Sosial,Agama dan Budaya di Kabupaten Mahakam Ulu dengan indicator sararan, Persentase Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan Dan Ekonomi.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan kehidupan masyakat yang harmonis dan demokratis	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	CC	B
		Terjaganya Idiologi Pancasila Dan karakter kebangsaan di kabupaten Mahakam Ulu	Persentase elemen masyakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;	93 %	94 %	95%	97%
		Menurunnya Potensi Konflik di masyarakat di kabupaten Mahakam Ulu	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditangani	87%	89%	90%	92%
		Meningkatnya Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu	Persentase elemen masyakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	93%	94%	95%	80%
		Meningkatnya Jumlah Ormas yang terbina di kabupaten Mahakam Ulu	Persentase Ormas/LSM yang dibina dan aktif	86%	90%	92%	92%
		Menigkatnya ketahanan Ekonomi,Sosial, Agama dan Budaya di	Persentase elemen masyakat yang mendapatkan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,	93%	94%	95%	96

		Kabupaten Mahakam Ulu	Kemasyarakatan Dan Ekonomi				

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2026 terdiri dari 6 (Enam) rumusan program, 10(Sepuluh) rumusan kegiatan, dan 21 (Dua Puluh Satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp . 21.786.644.564,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Rdelapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.676.259.300,-

   Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan program dan Keuangan, yang terdiri dari 5 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp7.449.330.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 7.072.970.000,-
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp.366.360.000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKDP (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 10.000.000,-

   b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 670.346.100,-

      Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Anggaran Rp.499.373.400,-
      2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan Anggaran Rp. 142.350.000,-
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Anggaran Rp. 28.622.700,-

   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran Untuk Kegiatan Ini Sebesar Rp.1 .133.000.000,-

Kegiatan Ini Terdiri dari 5 (Lima) Sub Kegiatan, yaitu :

1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantordengan Anggaran Sebesar Rp.25.000.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Anggaran Sebesar Rp. 9.000.000,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan. Dengan anggaran Rp.20.000.000,-
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.1.070.000.000,-

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.173.593.200,-

Kegiatan ini Terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan ,yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Suurat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor., dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.093.593.200,-

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusuan Pemerintah Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar RP.250.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) Sub kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perijina kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan. Dengan anggaran sebsar Rp. 100.000.000,-
2) Sub Kegiatan Pemeliaharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsanaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp .3.821.846.900,-

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan program dan Keuangan, yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsanaan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.821.846.900,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) Sub kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Perumusan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ikha dan Sejarah kebangsaan. Dengan anggaran sebesar Rp. 299.999.300,-
2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Idiologi Wawasan kebangsanaan, Belan Negara, Karakter Bangsa, pembaruan Kebangsaan, Bhinka Tunggal Ikha dan Sejarah Kebangsaan, dengan anggaran sebesar Rp.499.999.700,-
3) Sub Kegiatan pembentukan Paskibraka. Dengan anggaran sebesar Rp. 3.021.847.900,-

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Anggaran Untuk program Ini sebesar Rp. 1.223.408.864,-.

Program Ini dilaksanakan oleh Bidang Politik dalam Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan, Sebagai Berikut :

a. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang Pendidikan plitik, etika budaya politik, peningktana demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

Anggaran untuk kegiatan ini Sebesar Rp. 1.223.408.864,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan kebiajakn di bidang Pendidikan plitik, etikas serta budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daera, serta pemantauan situasi plitik di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 630.712.500,-
2) Sub Kegiatan pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan kebiajakn di bidang Pendidikan plitik, etikas serta budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daera, serta pemantauan situasi plitik di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 592.696.364,-

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 281.047.800,-

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Pemberdayaan MasyarakatYang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.

Anggaran untk kegiatan ini sebesar Rp. 281.047.800,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan pelaksanaan Monitarong, Evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah. Dengan Anggaran Sebesar Rp.281.047.800,-

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.640.744.700,-

   Program ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

      Anggaran Untuk Kegiatan ini Sebesar Rp.640.744.700,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu :

      1) Sub Kegiatan Pelaksanaan kebiajakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 640.744.700,-

6. Program Peningkatan Kewaspdaan Nasional dan Peningkatan Kuakitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.5.143.337.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh bidang keawaspadaan dini dan Penanganan Konflik dan yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, Sebagai Berikut :

   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspdanaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

      Anggaran Untuk Kegiatan Ini Sebesar Rp.5.143.337.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan, yaitu :

      1) Subu kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota. Dengan Anggaran sebesar Rp.1.247.764.000,-

      2) Sub Kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspdaaan berbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspdanaan, serta penanganan konflik di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp.3.895.573.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 serta Renstra Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026;

Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam hal ini, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu memiliki peran dalam pencapaian tujuan mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih,professional dan berorientasi pelayanan dan sasaran mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

1. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 6 (Enam) rumusan program, 10(Sepuluh) rumusan kegiatan, dan 21 (Dua Puluh Satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 21.786.644.564.- Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

7. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Anggaran untuk program ini sebesar Rp . Rp.10.676.259.300,-

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan program dan Keuangan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp7.449.330.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 7.072.970.000,-
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp.366.360.000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKDP (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 10.000.000,-

g. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 670.346.100,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sub kegiatan, yaitu:

1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Anggaran Rp.499.373.400,-
2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan Anggaran Rp. 142.350.000,-
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Anggaran Rp. 28.622.700,-

h. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran Untuk Kegiatan Ini Sebesar Rp.1 .133.000.000,-

Kegiatan Ini Terdiri dari 5 (Lima) Sub Kegiatan, yaitu :

1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantordengan Anggaran Sebesar Rp.25.000.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Anggaran Sebesar Rp. 9.000.000,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan. Dengan anggaran Rp.20.000.000,-
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.1.070.000.000,-

i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.173.593.200,-

Kegiatan ini Terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan ,yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Suurat Menyurat. Dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,-

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor. Dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dengan Anggaran sebesar Rp. 1.093.593.200,-

j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusuan Pemerintah Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp…….

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) Sub kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perijina kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan. Dengan anggaran sebsar Rp. 100.000.000,-
2) Sub Kegiatan Pemeliaharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

8. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsanaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.821.846.900,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang wawasan Kebangsaan dan social Budaya dan Sub wawasan kebangsaan, yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsanaan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.821.846.900,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) Sub kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Perumusan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ikha dan Sejarah kebangsaan. Dengan anggaran sebesar Rp. 299.999.300,-
2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Idiologi Wawasan kebangsanaan, Belan Negara, Karakter Bangsa, pembaruan Kebangsaan, Bhinka Tunggal Ikha dan Sejarah Kebangsaan. Dengan anggaran sebesar Rp.499.999.700,-
3) Sub Kegiatan pembentukan Paskibraka, dengan anggaran sebesar Rp. 3.021.847.900,-

9. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Anggaran Untuk program Ini sebesar Rp. 1.223.408.864,-.

Program Ini dilaksanakan oleh Bidang Politik dalam negeri dan Ormas yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan, Sebagai Berikut :

b. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang Pendidikan plitik, etika budaya politik, peningktana demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

Anggaran untuk kegiatan ini Sebesar Rp. 1.223.408.864,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan kebiajakn di bidang Pendidikan plitik, etikas serta budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daera, serta pemantauan situasi plitik di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 630.712.500,-
2) Sub Kegiatan pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan kebiajakn di bidang Pendidikan plitik, etikas serta budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daera, serta pemantauan situasi plitik di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 592.696.364,-

10. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 281.047.800,-

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Pandataan Ormas/LSM Yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan, sebagai berikut :

b. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.

Anggaran untk kegiatan ini sebesar Rp. 281.047.800,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan pelaksanaan Monitarong, Evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah. Dengan Anggaran Sebesar Rp.281.047.800,-

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.640.744.700,-

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Sosial, ekonomi, budaya dan agama Yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub kegiatan, sebagai berikut :

b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Anggaran Untuk Kegiatan ini Sebesar Rp.640.744.700,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan kebiajakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat

beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 640.744.700,-

12. Program Peningkatan Kewaspdaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

    Anggaran untuk program ini sebesar Rp.5.143.337.000,-

    Program ini dilaksanakan oleh bidang Kewaspadaan nasional penanganan konflik yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, Sebagai Berikut :

    b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspdanaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

       Anggaran Untuk Kegiatan Ini Sebesar Rp.5.143.337.000,-

       Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan, yaitu :

       1) Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota. Dengan Anggaran sebesar Rp.1.247.764.000,-
       2) Sub Kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspdaaan berbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspdanaan, serta penanganan konflik di daerah. Dengan anggaran sebesar Rp.3.895.573.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						Rp.21.786.644.564,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√			Rp.21.786.644.564,-	Badan Kesbangpol
2	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						Rp.21.786.644.564,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√			Rp.21.786.644.564,-	Badan Kesbangpol
3	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat SAKIP OPD	B		B	B	Rp.10.676.259.300,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih	B	Rp.10.676.259.300,-	Badan Kesbangpol

													3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
4	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Program, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol
5	8.01.01.2.01.0001	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp.447.574.400,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih	6 Dokumen	Rp.447.574.400,-	Badan Kesbangpol

													3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
6	8.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	2 Laporan	Rp.	Badan Kesbangpol
7	8.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	3 Laporan	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol

			Perangkat Daerah									2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
8	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	89%	89%	89%	Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	89%	Rp.	Badan Kesbangpol
9	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	13 Orang	13 Orang	23 Orang	Rp. 7.072.967.648,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	23 Orang	Rp. 7.072.967.648,-	Badan Kesbangpol

													2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
10	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 366.360.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	12 Dokumen	Rp. 366.360.000,-	Badan Kesbangpol
11	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp.10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	Rp.10.000.000,-	Badan Kesbangpol

		Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
12	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	92,53%	92,53%	92,53 %	Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	92,53%	Rp.	Badan Kesbangpol
13	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp. 15.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	2 Paket	Rp. 15.000.000,-	Badan Kesbangpol

		Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan									2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
14	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp. 5.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	1 Paket	Rp. 5.000.000,-	Badan Kesbangpol
15	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp. 150.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	2 Paket	Rp. 150.000.000,-	Badan Kesbangpol

													2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
16	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	6 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	1 Paket	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol
17	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		6				Rp.10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Rp.10.000.000,-	Badan Kesbangpol

													2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
18	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	18 Laporan	Rp. 800.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	18 Laporan	Rp. 800.000.000,-	Badan Kesbangpol
19	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		100 %				Rp.	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Rp.	Badan Kesbangpol

		Pemerintah Daerah											2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
20	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		6 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	3 Unit		Badan Kesbangpol
21	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	100%		Badan Kesbangpol

			pemerintah daerah										2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
22	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	12 Laporan		Badan Kesbangpol
23	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	5 Laporan		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	5 Laporan		Badan Kesbangpol

			dan Listrik yang Disediakan										2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
24	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 1.093.593.200,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	12 Laporan	Rp. 1.093.593.200,-	Badan Kesbangpol
25	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan	100 %	14,28%	14,28%	100%		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	100%		Badan Kesbangpol

		Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah									2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
26	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	2 Unit	2 Unit	7 Unit	90.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	7 Unit	90.000.000,-	Badan Kesbangpol
27	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit			10 Unit	Rp. 10.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	10 Unit	Rp. 10.000.000,-	Badan Kesbangpol

													2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah			
28	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp.150.000.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	1.Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2.Pembangunan pemerintahan yang bersih 3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah	1 Unit	Rp.150.000.000,-	Badan Kesbangpol
29	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	97%	83.33%	83.33%	97%	Rp. 3.821.846.900,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pemahakam idiologi dan wawasan kebangsaan pada masyarakat	97%	Rp. 3.821.846.900,-	Badan Kesbangpol

			wawasan Kebangsaan										kabupaten Mahakam ulu			
30	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	45%	45%	45%	Rp. 3.821.846.900,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		45%	Rp. 3.821.846.900,-	Badan Kesbangpol
31	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	55 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	10 Dokumen	Rp. 299.999.300,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		10 Dokumen	Rp. 299.999.300,-	Badan Kesbangpol

		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun													
32	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	Rp. 499.999.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu	12 Laporan	Rp. 499.999.700,-	Badan Kesbangpol

33	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	45 Orang			45 Orang	Rp. 3.021.847.900,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		45 Orang	Rp. 3.021.847.900,-	Badan Kesbangpol
34	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	92%	100%	100%	97%	Rp. 1.223.408.864,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pemahaman politik pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	97%	Rp. 1.223.408.864,-	Badan Kesbangpol
35	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,**	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	100%	35.43%	35.43%	100%		Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pemahaman politik pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	100%		Badan Kesbangpol

		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokerasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik													
36	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	350 Orang	248	248	248	Rp. 360.712.500,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		248	Rp. 360.712.500,-	Badan Kesbangpol

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
37	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	500 Orang	0	0	250 Orang	0	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu	250 Orang	0	Badan Kesbangpol

		n Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
38	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa	Jumlah Laporan	4 Laporan	0	0	4 Laporan	Rp. 592.696.364,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		4 Laporan	Rp. 592.696.364,-	Badan Kesbangpol

		n Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
39	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas/LSM yang terbina di Badan Kesbangpol	90%	50%	55,55%	90 %	Rp. 281.047.800,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan keaktifan Ormas/LSM dalam mebantu pemerintah dalam pembangunan	90 %	Rp. 281.047.800,-	Badan Kesbangpol
40	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasa**	Persentase Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang	100%	50%	50%	100%	Rp. 281.047.800,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan keaktifan Ormas/LSM dalam mebantu pemerintah dalam pembangunan	100%	Rp. 281.047.800,-	Badan Kesbangpol

		n Organisasi Kemasyarakatan	pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemsyarakatan												
41	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	4Laporan	Rp. 281.047.800,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√		4Laporan	Rp. 281.047.800,-	Badan Kesbangpol

42	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	96%	35%	37,23	96%	Rp. 640.744.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,social,budaya dan agama.	94%	Rp. 640.744.700,-	Badan Kesbangpol
43	8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi,Sosial dan BudayKegiatan a	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi,Sosial dan BudayKegiatan a	100%	35%	35%	100%	Rp. 640.744.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,social,budaya dan agama.	100%	Rp. 640.744.700,-	Badan Kesbangpol
44	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sos	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan	200 Orang	70	35%	150 Orang	Rp. 640.744.700,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan	150 Orang	Rp. 640.744.700,-	

		ial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										ekonomi,social,budaya dan agama.			
45	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI**	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	96%	35%	39,32	96%	Rp. 5.143.337.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	89%	Rp. 5.143.337.000,-	Badan Kesbangpol

		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
46	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	5.68%	5.68%	100%	Rp. 5.143.337.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	100%	Rp. 5.143.337.000,-	Badan Kesbangpol
47	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	75 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	Rp.3.895.563.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	12 Laporan	Rp.3.895.563.000,-	Badan Kesbangpol

		Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
48	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	13 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9 Dokumen	Rp. 1.134.240.000,-	Ujoh Bilang-Mahakam Ulu	APBD	-	√	Menurunnya konflik social pada masyarakat kabupaten Mahakam ulu	9 Dokumen	Rp. 1.134.240.000,-	Badan Kesbangpol

			Kabupaten/ Kota													

Sumber: ……. (URL di SIPD) [SIPD posisi paling akhir]

BAB V
P E N U T U P

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu ini berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun Anggaran 2026.

Ujoh Bilang, Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mahakam Ulu

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Fransiskus Ibrahim,SE.,M.Si.
NIP.19691231 200212 1 031

RENJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MAHAKAM ULU

TAHUN 2025